

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitia, F. B. (2018) *ICW: Ada Penurunan Tren Korupsi pada Semester I 2018*, *idntimes*.
- Afif, M. F. (2015) 'Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember', *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, p. 3.
- Alfitra (2014) *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses.
- Arens, A. A., Elder, R. J. and Beasley, M. S. (2015) *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Lima-Belas. Jakarta: Erlangga.
- Arsana, I. P. J. (2016) *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish.
- BPK. (2017) *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.1 Tahun 2017 STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.1 Tahun 2017 STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA*. kasus-suap-dirjen-hubla-kemenhub
- BPK. (2018). *IHPS I Tahun 2018*. Available at: <http://www.bpk.go.id/ihps/2018/I> (Accessed: 04 March 2019).
- BPK. (2017). *IHPS II 2017*. Available at: <http://www.bpk.go.id/ihps/2018/I> (Accessed: 04 March 2019).
- Bastian, I. (2014) *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Belaminus, R. (2017) *5 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all> (Accessed: 19 August 2019).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) *Deskripsi dan Analisis APBD*. Available at: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018) *Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2017*.
- Fatmawati, N. I. (2017) *Kronologi OTT KPK Terkait Suap BPK dan Kemendes*, *detiknews*. Available at: <https://m.detik.com/news/berita/d-3513004/begini-kronologi-ott-kpk-terkait-suap-bpk-dan-kemendes> (Accessed: 13 January 2019).

- Ferraz, C. and Finan, F. (2011) 'Electoral accountability and corruption in local governments: evidence from audit reports', *American Economic Review*, 101, pp. 1274–1311. doi: 10.1257/aer.101.4.1274.
- Gabrillin, A. (2017) *Kronologi Penangkapan Jaksa dan Bupati Subang oleh KPK*, *Kompas.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/12/17164421/Ini.Kronologi.Penangkapan.Jaksa.dan.Bupati.Subang.oleh.KPK>.
- Gusti, I. A. R. (2008) *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2015) *Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Kelima. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Hery (2017) *Auditing & Asurans; Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huefner, R. J. (2011) 'Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings', *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 3(3), pp. 111–125.
- Husna, N., Rahayu, S. and Triyanto, D. N. (2017) 'Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016)', *e-Proceeding of Management*, 4(2), pp. 1637–1642.
- Indonesia Corruption Watch (2017) *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*.
- Jahja, J. S. (2012) *Say No to Korupsi*. Cetakan 1. Edited by Z. Simatur. Jakarta: Visimedia.
- Khairudin and Erlanda, R. (2016) 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)', *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), p. 2016.
- KPK (2017) *Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37, Berita KPK*. Available at: <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/229-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37> (Accessed: 12 January 2019).
- KPK. (2017). *Buku Panduan SPI 2017*. Available at: [kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Panduan-SPI-2017.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Panduan-SPI-2017.pdf) (Accessed: 25 February 2019).
- KPK. (2016). *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- KPK. (2017). *Laporan Ilmiah SPI*. Available at: [kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian/671-survei-penilaian-integritas](https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian/671-survei-penilaian-integritas) (Accessed: 26 February 2019).
- Liu, J. and Lin, B. (2012) 'Government auditing and corruption control: Evidence

from China's provincial panel data', *China Journal of Accounting Research*. Sun Yat-sen University, 5(2), pp. 163–186. doi: 10.1016/j.cjar.2012.01.002.

Mahmudi (2011) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Malagueño, R. *et al.* (2010) *Accounting and Corruption : A Cross-COuntry Analysis, Journal of Money Laundering Control*.

Masdiantini, P. R. and Erawati, N. M. A. (2016) 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan', *Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), pp. 1150–1182. doi: 10.1179/026708301101509980.

Masyitoh, R. D. *et al.* (2015) 'Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun', *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*, pp. 1–26.

Mulyadi (2014) *Auditing*. Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Mustaqim, A. (2017) *ICW: Fenomena Suap Opini WTP Mengkhawatirkan*, *detikNews*. Available at: <https://news.detik.com/berita/3522344/icw-fenomena-suap-opini-wtp-mengkhawatirkan> (Accessed: 17 January 2019).

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*

Pratiwi, R. and Aryani, Y. A. (2017) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini', *Jurnal Akuntansi*, 20(2), p. 167. doi: 10.24912/ja.v20i2.52.

Priharjanto, A. and Wardani, yusniar yuliana (2012) 'Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia', *JIA*, 1(7), pp. 97–110.

Rini, R. and Damiati, L. (2017) 'Analisis Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), p. 73. doi: 10.24815/jdab.v4i1.4933.

Santoso, T. *et al.* (2011) *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. doi: 10.17528/cifor/003420.

- Sari, A. P. (2017). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Universitas Indonesia* .
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2014) *Research Methods for Business*. Wiley.
- Shohib & Haryanto (2014) Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi, Diponegoro, *Journal Of Accounting, Volume 3, Nomor 4*
- Siregar, S. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif dlengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (hal. 13). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) : Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, dan Teknik*. Alfabeta.
- Transparency International. (2017). *Corruption Perception Index 2017*. Available at: [Transparency.org:https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2017](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017) (Accessed: 05 March 2019)
- Tuanakotta, T. M. (2010) *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- U.S, Supardi. (2013) *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Change Publication.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Utomo, W. P., Diana, N. and Afifudin (2018) ‘Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia)’, *E-JRA*, 07(05), pp. 51–64.
- Yuliana, I. and Setyaningrum, D. (2016) ‘Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi’, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIX*, pp. 1–25